



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi dalam menjalankan pemerintahan memiliki lembaga-lembaga khusus berdasarkan tugas masing-masing. Dalam rangka untuk memahami perbedaan lembaga-lembaga khusus tersebut, maka dikategorikan dalam tiga ranah, yaitu kekuatan eksekutif atau pelaksana, kekuatan legislatif atau fungsi pengawasan, kekuasaan kehakimnan atau fungsi yudisial (Asshiddiqie, 2009, h. 499).

Dalam menjalankan roda pemerintahan, ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan. Misal dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR (legislatif), tapi dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan *co-legislator*, yaitu Presiden (eksekutif) (Asshiddiqie, 2009, h. 504).

Di sisi lain, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan pembangunan dan alokasi anggarannya. Namun, kekuasaan DPR juga terbatas, karena DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan atau Wakil Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum (Asshiddiqie, 2009, h. 505).

Hubungan serupa juga terjadi di tingkat daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah provinsi, Gubernur (Cangara, 2009, h. 73). DPRD juga mengawasi Gubernur dalam proses pemerintahan.

Namun, hubungan tersebut tampak kurang terjalin dengan baik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Basuki dan anggota DPRD memiliki pemikiran yang berbeda terkait menjalankan pemerintahan.

Pada 26 Februari 2015, diketuai oleh ketua fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, DPRD menggelar rapat paripurna pengesahan panitia hak angket atau penyelidikan. Seperti yang diberitakan *kompas.com*, alasan diajukannya hak angket tersebut guna menginvestigasi kesalahan Pemerintah Provinsi DKI dalam mengajukan dokumen APBD ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, Pemprov DKI mengajukan dokumen APBD tanpa melalui pembahasan dengan DPRD (Aziza, 2015, para. 2, para. 3).

Namun, pada 27 Februari, Basuki menyambangi KPK untuk melaporkan temuan Pemprov DKI soal dana Siluman (Andinni, 2015, para. 1). Basuki mengaku memiliki bukti-bukti seputar dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta dari 2012-2014 (Rudi, 2015, para. 2).

“Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan *e-budgeting* yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan di DPRD. Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp. 12 triliun,” kata Basuki (Rudi, 2015, para. 3).

Kemudian, Basuki juga menggandeng Badan Pengasawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit temuan dana siluman yang mencapai 12,1 triliun dalam draf APBD 2015 (Sucipto, 2015, h. 1).

Temuan dana siluman dalam draf APBD oleh Basuki ini menarik perhatian media, terutama media cetak yang mengambil porsi besar dalam melakukan pemberitaan. Luwi Ishwara mengatakan dalam cerita atau berita tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya. Dalam berita ada karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita (*news value*) (2007, h. 53).

Maraknya pemberitaan terkait temuan ‘dana siluman’ dalam RAPBD DKI Jakarta versi DPRD oleh Basuki ini karena terdapat nilai-nilai berita, yakni terkenal (*prominance*) dan konflik. Luwi Ishwara menjelaskan terdapat aura berita sekeliling orang-orang terkenal. Apa yang mereka lakukan atau katakan sering membuat berita karena ada konsekuensinya (Ishwara, 2007, h. 55). Maka, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta akan menjadi perhatian publik, mulai dari gaya pemerintahan, gaya bicara, dan masalah yang dihadapi.

Kemudian, kebanyakan konflik adalah layak berita. Konflik bukan hanya kontak fisik, tapi juga debat-debat (Ishwara, 2007, h. 53). Maka, perbedaan RAPBD antara Basuki dengan DPRD juga merupakan konflik yang terjadi dalam pemerintahan DKI Jakarta. Konflik seperti ini layak berita karena biasanya ada kerugian dan korban (Ishwara, 2007, h. 53). Korban dalam

konflik antara DPRD dan Basuki ini adalah PNS yang tidak mendapat gaji karena APBD DKI Jakarta yang tidak kunjung disetujui.

Pemberitaan terkait kasus ini tidak luput dari media-media nasional, seperti *Kompas* dan *Koran Sindo*. Pada 28 Februari 2015, harian *Kompas* menempatkan kasus tersebut pada halaman pertama dan *headline* utama dengan judul “KPK: Ada Indikasi Dana Siluman”.

Pada artikel tersebut, wartawan membahas tentang tindak lanjut KPK setelah Basuki melaporkan keganjilan RAPBD versi DPRD. Kemudian, dari KPK sendiri mengaku menemukan indikasi ‘anggaran siluman’ dalam kurun waktu 2012-2015 (“KPK: Ada Indikasi Dana Siluman”, 2015, h.1, h. 15)

Sementara *Koran Sindo* juga memberitakan di hari yang sama dan menempatkan berita dengan judul “Ahok Serahkan Bukti Dana Siluman” sebagai *headline* utama.

Dalam artikel tersebut dijabarkan kronologi penyerahan bukti ‘dana siluman’ dalam RAPBD veri DPRD oleh Basuki kepada KPK. Kemudian, diceritakan pula tentang Gubernur DKI Jakarta yang mendatangi Presiden Indonesia, Joko Widodo sebelum menuju KPK.

Kemudian, artikel tersebut ditutup dengan penyelesaian masalah antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (Laluhu, dkk. 2015, h.1 h. 15).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih surat kabar *Kompas* dan *Koran Sindo*. Menurut situs 4 International Media & Newspaper, yang merupakan direktori internasional dan mesin pencari yang berfokus pada surat kabar di seluruh dunia, pada 2014 *Kompas* menjadi koran yang paling banyak dibaca di Indonesia. *Kompas* unggul atas *The Jakarta Post* dan *Republika*. *Kompas* juga tidak terafiliasi pada partai politik manapun, karena Jakob Oetama dan P. K. Ojong yang berlatar belakang guru sebelum terjun dalam dunia jurnalistik.

Sementara, *Koran Sindo* yang berada dalam grup Media Nusantara Citra terbit pertama kali pada 2005. Berdasarkan jumlah oplahnya, harian ini menduduki peringkat ketiga nasional, dan peringkat kedua untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (Dewi, 2014, h. 6). Namun, pemilik dari MNC Group sendiri, Harry Tanoesodibjo (HT) memiliki karier politik di sejumlah partai, seperti Nasional Demokrat (Nasdem) pada 2011 sampai 2013 dan Hanura sebagai pasangan Capres Wiranto pada pemilu 2014 (Ihsanuddin, 2014, para. 6, para. 7, para. 8).

Akan tetapi, pasangan Wiranto-HT tidak banyak mendapat dukungan saat pemilu. Kemudian, dirinya pun memisahkan diri dan membuat partai baru yang diberi nama Perindo (Partai Persatuan Indonesia) (Ihsanuddin, 2014, para. 9).

Melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pembingkaiian atau konstruksi pemberitaan ‘Dana Siluman’ dalam RAPBD DKI Jakarta versi DPRD oleh Basuki Tjahaja Purnama dalam media, yakni *Kompas* dan *Koran Sindo*.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana konstruksi pemberitaan ‘dana siluman’ dalam RAPBD DKI Jakarta pada harian *Kompas* dan *Koran Sindo*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana konstruksi pemberitaan ‘dana siluman’ dalam RAPBD DKI Jakarta pada harian *Kompas* dan *Koran Sindo*?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya penelitian di bidang komunikasi, terutama komunikasi massa yang menggunakan analisis framing dengan empat pisau penelitian, yakni bagaimana fakta-fakta disusun dalam berita, berdasarkan kelengkapan berita, bagaimana sebuah peristiwa diceritakan oleh wartawan, dan bagaimana sebuah peristiwa ditonjolkan dalam berita.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait bagaimana media massa mengkonstruksi sebuah isu dalam berita yang dibuat. Selain itu juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap media, terutama mengenai pemingkakan media.

